



P-ISSN: 2716-2656, E-ISSN: 2985-9638

# JOURNAL MARINE INSIDE

VOLUME 7, ISSUE 1, JUNE 2025

Web: <https://ejournal.poltekpel-banten.ac.id/index.php/ejmi/>

## Implementasi KM Nomor 30 Tahun 2008 tentang Identitas Buku Pelaut di Syahbandar Tanjung Priok

Syamsiah Hasanah<sup>1\*</sup>, Aji Amanto<sup>2</sup>, Pramudyasari Nur Bintari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Pelayaran Banten

<sup>2</sup>Politeknik Pelayaran Surabaya

E-mail koresponden: [\\*syamhsnh26@gmail.com](mailto:*syamhsnh26@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Keputusan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 tentang Identitas Buku Pelaut di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Studi berlangsung pada Agustus 2022–Juni 2023 menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa proses penerbitan buku pelaut pada prinsipnya telah sesuai ketentuan KM No. 30/2008. Namun, ditemukan sejumlah kendala pada layanan berbasis daring, antara lain keterbatasan jaringan yang memperlambat layanan, masalah kode billing yang berpotensi menimbulkan duplikasi pembayaran, pemohon yang belum memenuhi batas usia, serta kesulitan pengguna dalam mengelola kredensial (username dan kata sandi). Upaya perbaikan yang diterapkan meliputi pelaporan rutin gangguan ke pusat TI untuk penataan basis data, pelaporan kasus double billing PNBPN kepada petugas disertai penambahan waktu proses, verifikasi usia saat pengambilan buku, serta pengingat bagi pengguna untuk menyimpan kredensial karena kantor tidak memiliki akses pemulihan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan infrastruktur jaringan, validasi otomatis kode billing, dan mekanisme pemulihan akun yang ramah pengguna guna meningkatkan mutu dan keandalan layanan.

**Kata Kunci:** Buku pelaut, KM 30/2008, Kesyahbandaran Tanjung Priok, layanan daring, kode billing PNBPN.

### ABSTRACT

This study evaluates the implementation of Ministerial Decree No. 30/2008 on the Seafarer's Identity Book at the Main Harbormaster Office of Tanjung Priok. Conducted from August 2022 to June 2023, the research adopts a qualitative approach using literature review, observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the issuance process generally complies with the decree; however, several challenges persist in the online service, including network limitations that slow service delivery, billing-code issues that may cause duplicate payments, applicants who do not meet the minimum age, and users' difficulty in managing credentials (username and password). Remedial actions include routine reporting of network disruptions to the central IT unit for database improvements, reporting double PNBPN billing cases to officers with additional processing time, age verification at the book collection stage, and user reminders to securely store their credentials since the office cannot retrieve them. These results underscore the need to strengthen network infrastructure, implement automated billing-code validation, and provide user-friendly account recovery to enhance service quality and reliability.



Journal Marine Inside is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

**Keywords:** *Seafarer's identity book, Ministerial Decree No. 30/2008, Tanjung Priok Harbormaster, online services, PNBPN billing code.*

Tersedia pada: <https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i1.106>

|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Submitted on 20/04/2025 | Reviewed on 28/04/2025  | Revised on 05/05/2025 |
| Accepted on 30/05/2025  | Published on 01/06/2025 |                       |

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan sehingga secara alamiah bertumpu pada sektor maritim untuk konektivitas dan perekonomian. Perkembangan aktivitas maritim tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan layanan administrasi kepelautan. Salah satu dokumen krusial bagi tenaga kerja pelayaran adalah buku pelaut, yang menjadi prasyarat legal untuk bekerja di laut dan dikeluarkan sebagai bagian dari program kerja kantor Kesyahbandaran di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Menjawab tuntutan layanan yang cepat, praktis, dan akurat, Kementerian Perhubungan mengimplementasikan layanan buku pelaut berbasis daring. Di Jakarta Utara, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menjadi salah satu pelaksana utama program ini. Sistem buku pelaut online mulai diterapkan pada 2016 dan terus disempurnakan. Peralihan dari sistem manual ke digital antara lain membantu mengurangi ketidaksesuaian data lapangan dengan buku pelaut, mencegah penggandaan dokumen, serta menekan praktik pemalsuan sijiil dan masa layar.

Secara normatif, KM No. 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut menetapkan bahwa buku pelaut adalah dokumen resmi negara berisi identitas fisik pelaut (bukan berbasis sidik jari), bukan dokumen perjalanan, dan tidak menggantikan paspor. Dokumen ini mencatat riwayat layar (track record) pelaut—termasuk tanggal dan tempat sign on serta sign off—yang dapat dibubuhkan oleh unit pembina awak kapal, Syahbandar, atau pejabat perwakilan RI di luar negeri [1]. Kewenangan penerbitan berada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan didelegasikan kepada Syahbandar di dalam negeri serta Atase Perhubungan pada perwakilan RI di luar negeri. Masih menurut KM No. 30/2008, setiap pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga  $\geq$  GT 35 (kapal motor) atau  $\geq$  GT 105 (kapal tradisional konstruksi sederhana), serta kapal perikanan dengan panjang  $\geq$  12 meter, wajib memiliki buku pelaut. Dokumen ini diberikan kepada pelaut yang telah memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan serta kepada taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar [2].

Di sisi implementasi, sejumlah hambatan operasional masih dijumpai. Pengguna jasa dan perusahaan pelayaran di beberapa wilayah melaporkan kendala akses ke sistem informasi buku pelaut, koneksi internet yang lambat, serta persoalan kredensial (lupa kata sandi, akun, atau email yang berganti-ganti). Kondisi tersebut mengganggu efektivitas penyelesaian dokumen dan memperlambat arus informasi dalam sistem [3]. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur jaringan, tata kelola akun pengguna yang lebih

baik, serta edukasi berkelanjutan kepada pemangku kepentingan agar layanan buku pelaut daring semakin andal dan akuntabel.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memotret praktik penerbitan buku pelaut dan menilai kesesuaiannya dengan KM No. 30 Tahun 2008. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam atas konteks, proses, dan makna layanan; data disajikan dalam bentuk naratif, bukan angka [4-5]. Penelitian berlangsung dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci [4], berlokasi di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok selama kurang lebih 10 bulan (sekitar Agustus 2022–Juni 2023).

Subjek penelitian ialah petugas penerbitan buku pelaut yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung mereka dalam proses layanan; sembilan petugas diwawancarai sebagai narasumber utama [6]. Data yang dihimpun terdiri atas primer (observasi alur layanan, verifikasi berkas, dan wawancara semi-terstruktur) serta sekunder (KM No. 30/2008, SOP internal, arsip layanan, dan literatur relevan). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terfokus di loket/sekretariat, wawancara untuk menggali pemahaman, hambatan, dan praktik penanganan masalah (misalnya gangguan jaringan, *billing* PNBPN ganda, kendala kredensial), serta dokumentasi atas formulir, tangkapan layar aplikasi, arsip elektronik, foto, dan catatan lapangan. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar periksa kesesuaian yang dipetakan ke butir-butir KM No. 30/2008 (definisi, kewenangan, syarat pemohon, pencatatan *sign on/off*, dan seterusnya). Prosedur pelaksanaan mencakup tahap persiapan (studi pustaka, perizinan, penyusunan instrumen), pengumpulan data (observasi bergilir, wawancara terjadwal, pengumpulan dokumen), konfirmasi/penyelarasan awal melalui *member checking* ringkas, dan pengorganisasian data ke dalam matriks tematik (alur layanan, kepatuhan regulasi, hambatan, solusi).

Analisis data mengikuti alur Miles & Huberman [7]: reduksi (pemilahan, pemusatan, penyederhanaan), penyajian (narasi/matriks untuk menampakkan pola), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara iteratif hingga temuan stabil. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber (petugas berbeda), triangulasi metode (observasi–wawancara–dokumentasi), dan jejak audit keputusan analitis. Aspek etis dipenuhi dengan pemberian informasi tujuan riset, persetujuan partisipasi, kerahasiaan identitas, dan pelaporan temuan secara agregat. Dengan rancangan ini, studi diharapkan menghasilkan gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesesuaian penerbitan buku pelaut di KSU Tanjung Priok dengan KM No. 30/2008 [1], mengidentifikasi hambatan utama layanan daring, serta menilai efektivitas langkah perbaikan yang telah diterapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Tanjung Priok, unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berwenang mengawasi dan menegakkan hukum keselamatan–keamanan pelayaran sekaligus mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Mandat ini mencakup pengawasan kelaiklautan kapal, ketertiban lalu lintas di alur dan kolam pelabuhan, port/flag state control, serta penerbitan Surat

Persetujuan Berlayar. Dalam layanan kepelautan, KSU juga menangani penyijilan awak dan penerbitan buku pelaut.

Hasil observasi dan wawancara sepanjang 1 Agustus 2022–6 Juni 2023 menunjukkan bahwa proses penerbitan buku pelaut berbasis daring pada prinsipnya selaras dengan ketentuan KM No. 30 Tahun 2008. Data operasional Februari–April 2023 mencatat 4.162 penerbitan—1.550 pada Februari, 1.655 pada Maret, dan 957 pada April. Lonjakan pada Maret diikuti penurunan pada April yang diasosiasikan petugas dengan faktor musiman dan kendala teknis. Di lapangan masih muncul beberapa hambatan berulang, antara lain keterbatasan jaringan yang memperlambat layanan, anomali kode billing PNBPN yang memicu duplikasi pembayaran, pengajuan oleh pemohon yang belum memenuhi usia minimal, serta masalah lupa nama pengguna dan kata sandi.

Untuk menjaga kontinuitas layanan, petugas menerapkan sejumlah perbaikan operasional. Gangguan jaringan dilaporkan berkala ke pusat TI untuk penataan basis data; kasus double billing dieskalasikan ke petugas dan pusat TI yang konsekuensinya memperpanjang waktu proses dari sekitar tiga hari menjadi lima hingga tujuh hari sampai tahap cetak; verifikasi usia dilakukan saat pengambilan buku guna mencegah penyalahgunaan oleh pemohon yang belum memenuhi syarat; sementara itu pengguna diimbau menyimpan kredensial karena kantor tidak memiliki akses pemulihan akun.

Pembahasan temuan mengindikasikan bahwa kanal daring meningkatkan ketertelusuran dan konsistensi data dibandingkan skema manual yang lebih rentan terhadap duplikasi atau pemalsuan. Namun kinerja layanan sangat bergantung pada infrastruktur jaringan dan kepatuhan pengguna. Pola volume yang tinggi pada Februari–Maret dan menurun pada April konsisten dengan kombinasi beban puncak dan hambatan teknis; setiap gangguan jaringan atau anomali billing berpotensi menumpuk antrian karena banyak tahapan memerlukan validasi sistem. Isu usia pemohon memperlihatkan perlunya kontrol preventif di hulu proses saat pendaftaran, tidak hanya pemeriksaan hilir saat pengambilan buku, sedangkan persoalan kredensial menandakan kebutuhan literasi digital yang lebih baik dan fitur pemulihan akun yang ramah pengguna.

Berdasarkan hasil tersebut, arah perbaikan yang disarankan meliputi penguatan ketersediaan dan keandalan layanan melalui redundansi jaringan dan pemantauan waktu nyata, penerapan validasi otomatis untuk usia dan deteksi duplikasi billing di tahap pendaftaran, peningkatan pengalaman pengguna dengan mekanisme reset kata sandi mandiri dan panduan status proses hingga “sudah di-print”, serta manajemen antrian dan komunikasi yang proaktif ketika terjadi gangguan. Secara keseluruhan, implementasi penerbitan buku pelaut daring di KSU Tanjung Priok telah berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi transparansi proses, tetapi kinerjanya masih dipengaruhi faktor teknis dan perilaku pengguna. Penguatan otomatisasi kontrol, infrastruktur, dan edukasi diharapkan membuat mutu layanan lebih andal, waktu proses lebih terukur, dan risiko ketidakpatuhan semakin kecil.

## **KESIMPULAN**

Penerbitan buku pelaut berbasis daring di KSU Tanjung Priok pada prinsipnya telah sesuai KM No. 30 Tahun 2008 dan berjalan baik. Namun, kinerja layanan masih terkendala stabilitas jaringan, anomali kode billing PNBPN (*double billing*), permohonan di bawah usia

minimum, serta lupa kredensial akun. Perbaikan yang paling berdampak mencakup penguatan infrastruktur TI (jaringan dan pemeliharaan sistem), validasi otomatis untuk usia dan kode billing, serta penataan manajemen akun (panduan dan pemulihan kredensial). Implementasi langkah-langkah ini diharapkan membuat proses lebih efisien, terukur, dan andal bagi pengguna layanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyusunan artikel ini, khususnya jajaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok atas kerja sama, informasi, dan data yang diberikan selama penelitian. Dukungan tersebut memungkinkan penelitian dan penulisan berjalan baik. Semoga hasilnya bermanfaat bagi peningkatan layanan serta implementasi KM No. 30 Tahun 2008 di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). (2008). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
- [2] Simatupang, D., Lumban Batu, P. N., & Junita, H. E. (2019). Analisis kepuasan pelaut terhadap pelayanan penerbitan buku pelaut online di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. [*Skripsi*]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- [3] Anwar, H., Niswaty, R., & Saleh, S. (2017). Pelayanan penerbitan buku pelaut berbasis online. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 11-24.
- [4] Sugiyono, S. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [5] Priyono, P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Penernit Zifatama.
- [6] Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publishing.